

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**  
**Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik**

**A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik Triwulan IV Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
<b>I</b>	<b><i>Sasaran Program 1</i></b> <b><i>Meningkatnya Produktivitas</i></b> <b><i>Badan Usaha Milik Negara di</i></b> <b><i>Bidang Infrastruktur dan</i></b> <b><i>Logistik</i></b>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah realisasi belanja modal BUMN Infrastruktur dan Logistik	Triliun Rupiah	21,55	21,55	48.92	120
1.2	Indikator 1.2 Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik	%	60	60	100	<b>120</b>
<b>II</b>	<b><i>Sasaran Program 2 Tersedianya</i></b> <b><i>Skema Pembiayaan Inovatif</i></b>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	%	50	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>120</b>
<b>III</b>	<b><i>Sasaran Program 3</i></b> <b><i>Terwujudnya Kebijakan</i></b> <b><i>Pengembangan Badan Usaha</i></b> <b><i>Milik Negara Bidang</i></b> <b><i>Infrastruktur dan Logistik, dan</i></b> <b><i>Stabilitas Ekonomi yang</i></b> <b><i>Berkualitas</i></b>					

3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda	%	80	80	<b>80</b>	<b>100</b>
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	%	80	80	<b>80</b>	<b>100</b>
3.3	Indikator 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	%	80	80	<b>80</b>	<b>100</b>
IV	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas</b>					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	<b>3.71</b>	<b>100</b>
V	<b>Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas</b>					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha	%	85	85	<b>85</b>	<b>100</b>

Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik					
--	--	--	--	--	--

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

**1**

**Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik**

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Belanja modal (capital expenditure/capex) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi capex mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.</p> <p>BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria di antaranya: merupakan BUMN dengan nilai asset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (go public), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PT Utama Karya (Target Rp7.870.800.000.000)</li> <li>b. PT Wijaya Karya (Target Rp3.431.400.000.000)</li> </ol> </li> <li>2. Bidang Logistik <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PT Pelabuhan Indonesia (Target Rp659.400.000.000)</li> <li>b. PT Kereta Api Indonesia (Target Rp8.450.400.000.000)</li> <li>c. PT Pos Indonesia (Target Rp235.200.000.000)</li> <li>d. PT ASDP Indonesia Ferry (Target Rp869.400.000.000)</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Target kinerja pada tahun 2025 sebesar Rp21,55 Triliun penetapan target tahun 2025 didasarkan pada <i>cascading</i> dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 21,55 triliun.</p> <p>Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Belanja Modal (Capex) BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar Rp 48.92 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:</p>
--	---

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	Triliun Rupiah	21,55	48.92	120

Realisasi belanja modal pada tahun 2025 tetap berada dalam rentang target karena tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang logistik nasional. Kondisi ini membuat kinerja BUMN di bidang infrastruktur dan logistik diprediksi stabil, sehingga target belanja modal tahun 2025 dapat tercapai sesuai rencana.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis BUMN tahun 2025, belanja modal difokuskan pada pembangunan terminal pelabuhan strategis, jalan tol, gedung-gedung di IKN, serta pengadaan alat produksi seperti kapal. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan bisnis konstruksi, industri besi baja, dan sektor terkait lainnya.

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
<b>Triwulan I</b>			
1.	Koordinasi rencana belanja modal (Capex) BUMN Infrastruktur 2025 dengan Kementerian BUMN	terlaksana	Pertemuan bilateral dengan Asisten Deputi Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN pada Kamis, 9 Januari 2025 di Gedung Ali Wardhana
2.	Koordinasi rencana belanja modal (capex) BUMN Logistik 2025 dengan Kementerian BUMN	terlaksana	Pertemuan bilateral dengan Asisten Deputi Jasa Logistik Kementerian BUMN pada 21 Januari 2025 di Gedung Ali Wardhana
3.	Penetapan Kriteria	terlaksana	Rapat internal di

	BUMN Infrastruktur dan Logistik yang dilakukan monitoring terkait komponen target realisasi belanja modal		Keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Tanggal 31 Januari 2025
4.	Penetapan belanja modal BUMN Infrastruktur dan Logistik berdasarkan kebijakan Kementerian BUMN	terlaksana	Rapat internal di Keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Tanggal 31 Januari 2025
<b>Triwulan II</b>			
6	Monitoring realisasi belanja modal (capex) BUMN terkait	Terlaksana	Rapat Koordinasi dan Monitoring Perkembangan kinerja dan CAPEX Triwulan II
<b>Triwulan III</b>			
7	Monitoring capaian realisasi belanja modal BUMN semester I	Terlaksana	Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke PT. INKA (Persero) di Madiun, Jawa Timur, tanggal 15 Agustus 2025.
8	Monitoring Tingkat utilitas belanja modal BUMN semester I	Terlaksana	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Penugasan Pemerintah kepada Perum Damri Cabang Serang, di Serang, Banten pada 9-10 Juli 2025.
<b>Triwulan IV</b>			
9	Monitoring Tingkat Utilitas Belanja Modal BUMN Semester I serta optimalisasi Belanja Modal di Semester II	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat lanjutan dalam rangka tindak lanjut KAD Sulampua pada tanggal 22 Oktober 2025 melalui zoom meeting. Selain dilakukan pembahasan terkait isu biaya di lapangan, terdapat juga pembahasan terkait dengan rencana-rencana</li> </ul>

				<p>belanja modal di kuartal IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat pembahasan terkait dengan akses <i>connecting bridge</i>, serta rencana pengembangan lanjutan dari Tower 2 dan kemungkinan upaya mendorong percepatan komitmen belanja modal terkait pembangunan tower tersebut di akhir tahun 2025 atau 2026</li> </ul>
<p>Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat dalam kantor pada Monitoring tingkat utilitas belanja modal BUMN Semester I - 2025, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp71.820.000 atau sebesar 85% dari pagu yang seharusnya sebesar Rp83.790.000.</p> <p><b>Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum sesuai antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi.</li> <li>2. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.</li> <li>3. Perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN</li> </ol> <p>Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-update data dan informasi secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN.</li> <li>2. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>				

**1.2. Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik**

**Latar Belakang**

BUMN memegang peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional melalui berbagai kontribusi terhadap penerimaan negara, termasuk dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta fungsi-fungsi ekonomi lainnya. Selain mengedepankan tujuan komersial, BUMN juga menjalankan misi pelayanan publik dengan menyediakan barang dan jasa bagi kepentingan umum, membuka bidang usaha yang belum dapat dijalankan oleh sektor swasta, serta membina pelaku usaha kecil melalui program kemitraan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Infrastruktur dan Logistik. Dalam hal ini, pemberian penugasan pemerintah lebih banyak mengacu pada RPJMN, RPJPN, dan Program Prioritas sehingga sulit untuk dilakukan dalam pengukuran. Namun, pemberian target terhadap penyelesaian penugasan pemerintah ini juga menjadi penting dalam mendorong percepatan, efisiensi, dan efektivitas dari pelaksanaan penugasan pemerintah tersebut yang diberikan kepada BUMN.

Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik dihitung dengan:

*Persentase Realisasi Pelaksanaan Penugasan*

$$= \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sebesar 60%. Penetapan target tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJPN, dan Program Prioritas. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada Triwulan IV adalah sebesar 60 %. Pada tahun 2025, target awal penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang infrastruktur dan logistik yakni:

- a. Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi JTTS tahun 2025
- b. Diskon Tarif tol dalam rangka hari libur Idul Adha dan libur sekolah 2025

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sebesar 100% atau mencapai 120% dari target Tahun 2025 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulanan	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik	%	60	100	120

Realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sebesar 100% atau tercapai 120% berdasarkan target ditentukan yang terdiri dari antara lain sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian pembangunan JTTS meliputi Tol Junction Palembang, Palembang-Betung Seksi 1 dan 2, Sigli Banda Aceh Seksi 1, serta Padang-Sicincin yang per Triwulan IV-2025 telah terealisasi lebih dari 60%.
- b. Penyelesaian pelaksanaan penugasan kepada PT Jasa Marga sebagai bagian dari program stimulus perekonomian untuk mendukung kelancaran

arus mudik dan arus balik pada periode Lebaran 2025. Namun penugasan ini merupakan direktif agar BUMN dimaksud dapat memberikan diskon melalui aksi korporasi bukan melalui penugasan khusus, serta penyelesaian pelaksanaan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi melalui penugasan kepada BUMN antara lain PT KAI (diskon tarif), PT Pelni (Diskon Tarif), dan PT ASDP Indonesia Ferry (pembebasan tarif jasa kepelabuhan) dalam rangka libur Idul Adha dan liburan sekolah.

Selain itu, pada triwulan IV-2025 juga terdapat penambahan penugasan khusus dalam rangka stimulus ekonomi yaitu:

- a. Penugasan khusus kepada PT Pos Indonesia melalui SKB Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN, dan Kepala BPI Danantara untuk Penyaluran BLT Kesra 2025
- b. Penugasan khusus kepada BUMN antara lain PT KAI (diskon tarif), PT Pelni (Diskon Tarif), dan PT ASDP Indonesia Ferry (pembebasan tarif jasa kepelabuhan) dalam rangka liburan sekolah dan liburan Nataru

Penugasan khusus ini menjadi tambahan dalam target tahun berjalan di triwulan IV-2025.

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

**1.2 Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan <small>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)</small>
<b>Triwulan I</b>			
1	Koordinasi sinkronisasi stakeholder skema pemerintah BUMN terkait dan dengan terkait penugasan kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pertemuan bilateral dengan Direksi PT Pelindo pada 12 Februari 2025 di Jakarta dengan agenda mendiskusikan isu strategis, peran dan dukungan PT Pelindo dalam ekosistem logistik nasional, beserta RKP dan RPJP.</li> <li>● Pertemuan bilateral dengan Direksi Perum Damri pada 18 Februari 2025 di Jakarta dengan agenda mendiskusikan isu strategis, peran dan dukungan Perum DAMRI dalam ekosistem logistik nasional, beserta RKP dan RPJP.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan bilateral dengan Direksi PT ASDP pada 19 Februari 2025 di Jakarta dengan agenda mendiskusikan isu strategis, peran dan dukungan PT ASDP dalam ekosistem logistik nasional, beserta RKP dan RPJP.</li> <li>• Pertemuan bilateral dengan Direksi PT Waskita pada 11 Februari 2025 di Gedung Pos Ibukota dengan agenda mendiskusikan isu strategis, peran dan dukungan PT Waskita dalam pengembangan infrastruk, beserta RKP dan RPJP.</li> <li>• Pertemuan bilateral dengan Direksi PT Jasa Marga pada 13 Februari 2025 di Kantor Jasa Marga dengan agenda mendiskusikan isu strategis, penugasan pemerintah, beserta RKP dan RPJP.</li> <li>• Pertemuan bilateral dengan Direksi PT Pelni pada 21 Februari 2025 di Gedung Pos Ibukota dengan agenda mendiskusikan isu strategis, penugasan pemerintah, beserta RKP dan RPJP.</li> </ul>
<b>Triwulan II</b>				
2	Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait skema penugasan pemerintah kepada BUMN Terkait	Terlaksana		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dan Monitoring dengan BUJT yang dilakukan beberapa kali sepanjang Triwulan II 2025.</li> <li>• Rapat koordinasi tgl 20 Juni 2025 agenda dengan update pelaksanaan diskon tarif transportasi dan penyiapan teknis penganggaran untuk diskon tarif transportasi.</li> </ul>

	3	Monitoring dan Evaluasi KPI PMN pada PT Utama Karya, PT Jasa Marga, PT Waskita Karya, PT KAI, PT PELNI, PT INKA untuk pelaksanaan penugasan pemerintah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dan Monitoring penyelesaian isu strategis dan kinerja dengan BUMN terkait yang dilakukan beberapa kali sepanjang Triwulan II 2025.</li> </ul>
	4	Koordinasi Penguatan Peran Perumnas dalam Program 3 Juta rumah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi bersama Perumnas dan K/L terkait pada tanggal 3 Juni 2025</li> </ul>
<b>Triwulan III</b>				
	5	Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait skema penugasan pemerintah kepada BUMN terkait logistik	terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan diskusi update IMO TAC Perkeretaapian dengan DJKA Kementerian Perhubungan dan PT. KAI tanggal 2 September 2025 secara daring.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proses Reimbursement Stimulus Diskon Transportasi secara daring melalui Zoom Video Conference tanggal 3 September 2025.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Stimulus Diskon Transportasi secara daring melalui Zoom Video Conference tanggal 26 September 2025.</li> </ul>
<b>Triwulan IV</b>				
	6	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN Infrastruktur dan Logistik	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rakor Penyiapan Regulasi Pelaksanaan Stimulus Diskon Transportasi Periode Libur Nataru pada tanggal 1 Oktober 2025 melalui Zoom Video Conference, dengan hasil Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan agar</li> </ul>

				<p>mengintegrasikan program mudik Nataru gratis dengan pelaksanaan stimulus diskon tarif transportasi untuk moda angkutan laut dan penyiapan payung hukum diselesaikan sebelum penjualan tiket gratis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Melanjutkan Rakor Stimulus Diskon Transportasi Periode Libur Nataru pada tanggal 31 Oktober 2025 melalui Zoom Video Conference dengan hasil Ditjen Hubla menyiapkan sosialisasi Program Mudik Nataru Gratis dan Program Stimulus Diskon Transportasi dan Masing-masing BUMN operator didukung oleh stakeholder terkait agar menyiapkan sosialisasi melalui seluruh kanal media sosial dengan narasi yang transparan mengenai besaran diskon riil yang diterima masyarakat.</li><li>● Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Stimulus Diskon Transportasi Periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), tanggal 4 November 2025 melalui Zoom Meeting dengan hasil masing-masing BUMN operator didukung oleh stakeholder terkait menyiapkan sosialisasi melalui seluruh kanal media sosial dengan narasi yang transparan mengenai besaran diskon riil yang diterima masyarakat,</li><li>● Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyaluran BLT Kesra,</li></ul>
--	--	--	--	--

				<p>tanggal 23 Oktober 2023, di Jakarta dengan hasil Bank penyalur (BRI, BNI, Mandiri, BSI) menyampaikan konfirmasi kesiapan dan kesanggupan kepada Kementerian Sosial paling lambat Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB dan PT Pos menyiapkan kapasitas sistem dan sumber daya untuk penyaluran ke KPM yang belum memiliki rekening.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Update Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) pada tanggal 31 Oktober 2025, di Jakarta dengan hasil Percepatan penandatanganan SKB 4 pihak pada minggu berjalan sebagai payung hukum penugasan PT Pos (sesuai UU 16/2025) dan Kemenko Perekonomian menyampaikan surat permohonan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan kepada Jamdatun</li><li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran BLTS Kesra Tahap Kedua pada tanggal 14 November 2025 di Jakarta, dengan hasil Percepatan proses SPM dan pencairan anggaran BLTS Kesra ke rekening PT Pos Indonesia oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan sehingga target 20 November 2025 dapat mulai penyaluran oleh PT Pos Indonesia. Kementerian Sosial melakukan percepatan</li></ul>
--	--	--	--	---

			<p>konfirmasi terhadap sisa Tahap I sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut untuk peralihan penyaluran dari bank penyalur menjadi Pos Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian program prioritas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) pada tanggal 4 Desember 2025 di PT Pos Jakarta Timur dengan hasil menargetkan penyelesaian penyaluran BLTS Kesra pada minggu kedua Desember 2025 dan mendorong nyata perekonomian nasional menjelang akhir tahun 2025.</li> </ul>
	<p><b>Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi Update IMO TAC Perkeretaapian dengan DJKA Kementerian Perhubungan dan PT. KAI tanggal 2 September 2025 menghemat konsumsi sebesar Rp.2.025.000, karena dilaksanakan secara daring;</li> <li>• Rapat Koordinasi Proses Reimbursement Stimulus Diskon Transportasi secara daring melalui Zoom Video Conference tanggal 3 September 2025 menghemat konsumsi sebesar Rp.3.240.000, karena dilaksanakan secara daring; dan</li> <li>• Rapat Koordinasi Stimulus Diskon Transportasi secara daring melalui Zoom Video Conference tanggal 26 September 2025 menghemat konsumsi sebesar Rp.4.050.000, karena dilaksanakan secara daring.</li> </ul> <p><b>Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pendapat lain di media sosial terkait dengan kebijakan diskon transportasi dimana sejumlah Masyarakat menyampaikan bahwa lebih dibutuhkan diskon harga sembako ketimbang diskon transportasi;</li> <li>2. Tantangan pemberian diskon tarif tol pada periode akhir libur sekolah di ruas tol Jakarta – Cikampek adalah pada penjelasan detail mengenai hitungan bisnis terkait insentif diskon ini kepada investor swasta</li> </ol>		

	<p>terutama investor asing, karena 60% saham JLC ini dimiliki investor swasta. Para investor tidak mempermasalahkan adanya insentif diskon ini tetapi dikembalikan ke bisnis awal dan dalam PPJT tidak ada pasal mengenai diskon. Dalam hal ini, investor menghubungi Perusahaan menanyakan jangka waktu pemberian diskon tarif tol karena tidak disebutkan periode waktunya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Permasalahan pada dasar hukum bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi berupa pemberian diskon tarif.</li> <li>4. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.</li> </ol> <p>Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melihat multiplier effect dari diskon tarif tol yang telah dijalankan selama ini, perlu mengecek apakah terdapat kenaikan pada data pariwisata sekitar yang terhubung jalan tol, salah satunya adalah kenaikan wisatawan yang berkunjung. Selain itu perlu juga melihat dampak perekonomian dari diberlakukannya diskon tarif tol selama ini kepada masyarakat sekitar;</li> <li>2. Perlu melakukan kajian terkait diskon transportasi ini kaitannya dengan peningkatan perekonomian negara dan keuntungan bagi BUMN;</li> <li>3. Pembuatan dasar hukum bagi BUMN yang akan melakukan pemberian tarif pada periode Nataru, yang ditandatangani oleh K/L terkait</li> <li>4. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>
--	---

## 2

### Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk memperluas kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan daerah pada transfer dari pusat, serta mempercepat realisasi program dan proyek pembangunan yang memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>Kesuksesan implementasi skema pembiayaan inovatif sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan daerah, termasuk dalam mengakses skema pembiayaan tersebut, misalnya pinjaman daerah. Pinjaman, bila dikelola secara hati-hati dan berbasis pada analisis kelayakan yang matang, bukanlah beban melainkan</p>
---	--

investasi jangka panjang. Komitmen ini mencakup keberanian mengambil keputusan strategis, kesiapan tata Kelola proyek, serta sinergi lintas sektor yang solid.

Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah merupakan alat untuk mengukur efektivitas dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketersediaan skema pembiayaan inovatif, khususnya melalui instrumen pinjaman daerah. IKU ini mencerminkan sejauh mana komitmen pinjaman yang telah disepakati dan direncanakan oleh Pemerintah Daerah benar-benar berhasil dicairkan dan dimanfaatkan untuk membiayai program serta kegiatan pembangunan. Adapun regulasi yang mendasari pelaksanaan pinjaman daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

$$\text{Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah} = \frac{\text{Nilai Komitmen yang disepakati}}{\text{Target Jumlah Komitmen Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah pelaksanaan komitmen sebesar Rp1 Triliun. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 50 yang telah dicapai pada Triwulan IV, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	%	50	300	120

Realisasi komitmen pinjaman daerah pada Triwulan IV Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000.000,- atau 50% dari target pelaksanaan komitmen pinjaman daerah sebesar 1 Triliun Rupiah. Berdasar kan target tersebut, serta upaya sosialisasi, peningkatan kapasitas perangkat Pemerintah Daerah maupun *debottlenecking* isu-isu yang muncul, Keasdepan BUMN di Bidang Infrastruktur dan Logisitik bersama para K/L terkait berhasil mendorong beberapa komitmen pinjaman daerah dari beberapa daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pemkot Manado (Proyek SPAM) dengan komitmen sebesar 80 Miliar Rupiah. Namun terdapat beberapa perubahan dukungan politik yang membuat Pemkot Manado tidak mencairkan komitmen yang sudah mereka setujui.
2. Pemkab Lampung Tengah (Proyek Jalan) dengan komitmen sebesar 110 Miliar Rupiah, dengan target pencairan keseluruhan komitmen di targetkan di tahun 2025
3. Pemkab Badung (Proyek Jalan) dengan nilai komitmen sebesar 2.8 Triliun Rupiah

## Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

### 2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
<b>Triwulan I</b>			
1	Koordinasi Penyusunan Komitmen Bersama antar stakeholder dalam rangka percepatan penyaluran pinjaman daerah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat Koordinasi SOP Link Pinjaman daerah pada tanggal 15 Januari 2025</li><li>• Rapat Koordinasi SOP Link Level Eselon I pada tanggal 10 Maret 2025</li></ul>
<b>Triwulan II</b>			
2	Monitoring penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai pinjaman daerah	Belum Terlaksana	Diagendakan pada TW selanjutnya menyesuaikan jadwal stakeholders
3	Monitoring penyelesaian kewajiban pembayaran pinjaman daerah	Terlaksana	Rapat Monitoring tunggakan pinjaman Kabupaten Yapen telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 dan 18 Juni 2025
4	Identifikasi hambatan Regulasi Pinjaman Daerah	Terlaksana	Telah terlaksana Rakor SOP Link pada tanggal 23 Juni 2025
5	Sosialisasi skema baru pinjaman daerah	Terlaksana	Sosialisasi Skema Pinjaman Daerah Baru yang dilaksanakan di Surabaya
<b>Triwulan III</b>			
6	Penggunaan sistem informasi bersama untuk proses pengajuan dan monitoring dan	Terlaksana	Melaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Tata Kelola Pertimbangan 3

	evaluasi pinjaman daerah		Menteri untuk Pinjaman Daerah secara daring melalui aplikasi Zoom Video Conference tanggal 30 Juli 2025.
7	Sosialisasi pinjaman daerah	Terlaksana	Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Daerah tanggal 18 September 2025 di Denpasar, Bali.
8	Penandatanganan komitmen pinjaman daerah	Terlaksana	Menghadiri Acara Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Manado di Manado, Sulawesi Utara tanggal 1-3 Juli 2025.
9	Monitoring penyelesaian proyek Pembangunan infrastruktur yang dibiayai pinjaman daerah	Terlaksana	Rapat Koordinasi Finalisasi Draft Berita Acara Kerja Sama Koordinasi Percepatan Penyediaan Pembiayaan Utang Daerah berbentuk Pinjaman Daerah untuk Pembiayaan Infrastruktur dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional melalui Penugasan kepada PT. SMI tanggal 3 September 2025 di Kemenko Perekonomian.
10	Monitoring penyelesaian kewajiban pembayaran	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Yapen tanggal 13 Agustus 2025 melalui daring.
<b>Triwulan IV</b>			
11.	Penandatanganan komitmen pinjaman daerah	Terlaksana	Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Kabupaten Badung, Prov.Bali pada tanggal 30 Oktober di Badung,

				Bali dengan hasil PT SMI menyetujui pengajuan pinjaman daerah Kab Badung dengan tenor 48 bulan. Peresmian penyaluran pinjaman tersebut dilakukan melalui penandatanganan perjanjian pinjaman Kab Badung dengan PT SMI.
	12.	Monitoring penyelesaian proyek Pembangunan infrastruktur yang dibiayai pinjaman daerah (memenuhi realisasi rencana aksi di TW II yang belum terlaksana) dan penyelesaian kewajiban pembayaran	Terlaksana	Melaksanakan rapat koordinasi SOP Link bersama dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya pada tanggal 2 Desember 2025 di Hotel Borobudur
<p>Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Teknis Pembahasan Tata Kelola Pertimbangan 3 Menteri untuk Pinjaman Daerah secara daring melalui aplikasi Zoom Video Conference tanggal 30 Juli 2025 menghemat konsumsi sebesar Rp.2.025.000, karena dilaksanakan secara daring; dan</li> <li>• Menghadiri Acara Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Manado di Manado, Sulawesi Utara tanggal 1–3 Juli 2025 menghemat anggaran perjalanan dinas karena dibiayai full oleh Pt. SMI.</li> </ul> <p>Hasil efisiensi tersebut diatas dapat dialokasikan untuk alokasi anggaran melaksanakan monitoring dan evaluasi di kegiatan lain.</p> <p><b>Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Alokasi belanja daerah untuk pembayaran bunga pinjaman maupun AP sebagai bagian dari pemenuhan urusan wajib Pemerintah Daerah (Mandatory Spending).</li> <li>2. Sinergi program Kementerian Kesehatan dalam pengembangan Rumah Sakit di daerah dengan rencana pembangunan Rumah Sakit oleh Pemerintah Daerah. Sinergi dapat dilakukan dengan penyediaan alat</li> </ol>				

	<p>Kesehatan oleh Kemenkes dan pembangunan infrastruktur fisik oleh Pemerintah Daerah (dalam bentuk pembiayaan kreatif).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Potensi skema pembiayaan infrastruktur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dengan mengkombinasikan pembiayaan kreatif dengan fasilitas pembiayaan murah (suku bunga 2%) untuk wilayah tersebut.</li> <li>4. Pergantian kepala daerah di awal tahun 2025 serta perkembangan politis juga memberikan kendala pada beberapa kasus pinjaman daerah yang telah dilakukan pada tahun ini</li> <li>5. Efisiensi anggaran pada tahun 2025 juga memberikan dampak negative pada upaya pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemda, seperti misalnya terbatasnya anggaran untuk melakukan persiapan penyiapan dokumen dsbnya, yang menyebabkan upaya pinjaman daerah yang dilakukan perlu ditunda ke tahun 2026 untuk lebih dapat menyiapkan anggaran yang dibutuhkan</li> </ol> <p>Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi lebih lanjut dengan Kemenkeu terkait pemenuhan mandatory spending.</li> <li>2. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan PT SMI untuk melakukan mapping lokasi target prioritas pembangunan rumah sakit dan kemampuan fiskal daerahnya.</li> <li>3. Koordinasi dengan Kemendes PDTT untuk menganalisis lebih lanjut kebutuhan dan kemampuan pemda di wilayah 3T dalam mendorong capaian target pembangunan infrastruktur disana.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi pembiayaan untuk Pemerintah Daerah dengan kriteria yang lebih siap untuk melakukan pinjaman daerah, seperti misalnya memenuhi kriteria kapasitas fiskal yang cukup, serta memiliki komitmen maupun dukungan politik</li> </ol>
--	---

### 3

#### **Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda**

**Latar Belakang**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat efektivitas proses lintas sektor dalam mendukung pengembangan kebijakan integrasi transportasi multimoda yang berorientasi pada Transit Oriented Development (TOD). Proses ini dinyatakan efektif apabila kebijakan atau rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, maupun pelaku usaha, serta dilakukan evaluasi implementasi melalui penyusunan laporan pemantauan

dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai persentase efektivitas ini antara lain:

1. Pemetaan isu strategis terkait integrasi transportasi multimoda dan konektivitas kawasan TOD;
2. Sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan roadmap antar pemangku kepentingan (transportasi, perumahan, tata ruang, investasi);
3. Fasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan simpul transportasi dan kawasan TOD;
4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala;
5. Tugas atau fungsi ad hoc yang muncul dari arahan Presiden atau Menteri dalam konteks penguatan integrasi moda transportasi nasional.

Adapun nilai dari persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

**1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Infrastruktur dan Logistik dalam mendukung integrasi transportasi multimoda untuk logistik dan integrasi transportasi multimoda berbasis kawasan *Transit Oriented Development* (TOD).**

% efektivitas SKP=Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 80% pada Triwulan IV, dengan ringkasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Kinerja</b>
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda	%	80	80	100

Realiasi Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda mencapai 100 % dari target sebesar 80% sampai dengan laporan ini disusun.

Realisasi ini didukung oleh serangkaian upaya koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung kebijakan dan implementasi integrasi multimoda yang dilaksanakan oleh BUMN di bidang logistik.

### Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

<b>3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi TW IV</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b> <small>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)</small>
<b>Triwulan I</b>			
	Identifikasi isu Penyusunan strategis pengembangan TOD	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi bersama Perum Perumnas pada tanggal 20 Februari 2025 di Ruang Rapat Biro Umum V Gedung Pos</li> </ul>
	Koordinasi optimalisasi integrasi transportasi intermoda dan multimoda internasional	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi pada 19 Maret 2025 di Surabaya dengan agenda Pembahasan Isu Optimalisasi Transportasi Integrasi Intermoda dan Multimoda Internasional.</li> </ul>
<b>Triwulan II</b>			
	Penyusunan alternatif penyelesaian isu TOD melalui koordinasi dan monitoring pengembangan TOD	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi serata rapat koordinasi pada 3 TOD bersama Perumnas dan k/l terkait pada tanggal 2 Juni 2025</li> </ul>
<b>Triwulan III</b>			
	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait implementasi integrasi transportasi intermoda dan multimoda	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan TOD Samesta Mahata Margonda tanggal 15 Juli 2025 di Hotel Movenpick Jakarta.</li> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Update Perkembangan</li> </ul>

			<p>Pengajuan SLF dan Penyusunan Timeline Percepatan Izin Operasi Stasiun Pondok Cina Baru tanggal 28 Juli 2025 di TOD Samesta Mahata Margonda Depok</p>
	<p>Sosialisasi Implementasi integrasi transportasi intermoda dan multimoda</p>	<p>Terlaksana dengan perubahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan rencana aksi ini akan disisipkan ke dalam bagian rencana aksi yang dilakukan terkait isu multimoda di wilayah Pulau Jawa</li> </ul>
<b>Triwulan IV</b>			
1.	<p>Monitoring progress penyelesaian isu terkait integrasi transportasi intermoda dan multimoda</p>	<p>Terlaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Integrasi Multimoda Stasiun Semarang Tawang (Ronggowarsito) dan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelabuhan Tanjung Emas pada tanggal 30 Oktober 2025 di Semarang, dengan hasil diperlukannya penyelesaian perizinan untuk operasional jalur KA dari Ronggowarsito – TPKS, dan Jalur KA sudah ada namun saat ini belum dikeluarkan izin operasional jalur Kereta Api Karena jalur KA tersebut masih membutuhkan penyempurnaan,</li> <li>• Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Integrasi Logistik Multimoda Stasiun Semarang Tawang</li> </ul>

			<p>(Ronggowarsito) dan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelabuhan Tanjung Emas pada tanggal 1 Desember 2025, di Jakarta dengan hasil DJKA Kementerian Perhubungan agar melakukan percepatan penerbitan izin operasional prasarana dan sarana perkeretaapian untuk layanan multimoda yang menghubungkan Stasiun SMT Ronggowarsito – TPKS Tanjung Emas.</p>
2.	Monitoring dan evaluasi isu strategis pengembangan TOD	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembukaan Jembatan Connecting TOD Samesta Mahata Serpong, Pada tanggal 6 Oktober 2025, di Jakarta dengan hasil Perum Perumnas wajib memenuhi kesepakatan dalam Risalah Rapat Koordinasi terkait permohonan Izin bukaan Akses untuk Angkot dari Jalan Raya Rawa buntu Menuju Rumah Susun Mahata Serpong dan Stasiun Rawa Buntu tanggal 13 November 2025.</li> <li>● Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan</li> </ul>

			<p>Pembukaan Stasiun Pondok Cina Baru pada tanggal 18 November 2025, di Jakarta, dengan hasil Perum Perumnas menyiapkan seluruh dokumen-dokumen tindak lanjut yang masih dibutuhkan berdasarkan hasil verifikasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. PT KAI akan menyiapkan dokumen lain yang dibutuhkan untuk pengajuan izin operasi stasiun sambil menunggu Perumnas melengkapi dokumen Safety Assesment.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Pembukaan Jembatan Connecting TOD Samesta Mahata Serpong, pada tanggal 24 November 2025 di Jakarta dengan hasil Perumnas segera menyampaikan surat permohonan izin prinsip pemanfaatan BMN kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PU.</li><li>• Peresmian skybridge TOD Samesta Mahata Tanjung Barat pada pada 12 Desember 2025</li></ul>
--	--	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Rapat Koordinasi Update Perkembangan Pengajuan SLF dan Penyusunan Timeline Percepatan Izin Operasi Stasiun Pondok Cina Baru tanggal 28 Juli 2025 di TOD Samesta Mahata Margonda Depok menghemat anggaran sebesar Rp.2.430.000, karena dibiayai oleh Perum Perumnas; dan
- Rapat Koordinasi Pembahasan Isu–isu terkait Pengembangan TOD Samesta Mahata Serpong tanggal 29 September 2025 menghemat anggaran sebesar Rp.2.430.000, karena dibiayai oleh Perum Perumnas.

Hasil efisiensi tersebut diatas dapat dialokasikan untuk alokasi anggaran melaksanakan monitoring dan evaluasi di kegiatan lain.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perum Perumnas butuh melakukan relokasi gate tapping ke lantai 2 Stasiun Rawa Buntu untuk kenyamanan penghuni Apartemen Mahata Samesta di TOD Serpong.
2. Pembangunan Jembatan Connecting ini sejalan dengan rekomendasi Andalalin dari Pemerintah Kota Tangsel yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan akibat padatnya antrian kendaraan umum di depan stasiun Rawa Buntu. Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Perumnas di atas tanah milik PT KAI dengan menggunakan anggaran PMN.
3. PKS yang belum final antara Perumnas dan KAI cukup menghambat beberapa pelaksanaan teknis di lapangan di beberapa proyek TOD Samesta
4. Tidak masuknya proyek 3 juta rumah yang di dalamnya termasuk kepada proyek-proyek TOD menghambat percepatan yang dilakukan pada TOD Perumnas yang Tengah berjalan maupun rencana penambahan TOD yang direncanakan oleh Perumnas

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perum Perumnas akan mengajukan surat permohonan relokasi gate tapping Stasiun Rawa Buntu ke DJKA Kementerian Perhubungan cc Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Kemenko Perekonomian. Selanjutnya DJKA akan menanggapi dengan mengirimkan

detail persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Prinsip, termasuk didalamnya Standar Teknis Prasarana, SPM, dan lain sebagainya untuk dipenuhi Perumnas.

2. Perum Perumnas akan menyampaikan progress pemenuhan dari rekomendasi Andalalin dan Risalah Rapat tanggal 4 Desember 2023 yang sudah dan sedang proses dikerjakan.
3. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian akan segera mengadakan rapat koordinasi pembahasan izin pembukaan jembatan connecting dengan mengundang stakeholders terkait termasuk DJBH Kementerian PU pada pekan depan.
4. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian mendorong percepatan penyelesaian PKS antara Perumnas dan KAI untuk percepatan permasalahan yang diakibatkan oleh permasalahan tersebut
5. Penjabaran Asta Cita Presiden Prabowo menjadi dasar Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik untuk mendorong percepatan penyelesaian pengembangan TOD yang sedang dilakukan oleh Perumnas

**3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah**

**Latar Belakang**

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif internal business process

yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian.

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka mendorong penguatan kerja sama antardaerah/(KAD), khususnya yang bertujuan mendukung pengembangan infrastruktur dan efisiensi sistem logistik daerah.

**1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah**

*% efektivitas SKP*

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 80% pada Triwulan IV Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	%	80	80	100

Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah mencapai 100% dari target 80% sampai laporan ini disusun.

Realisasi Triwulan IV pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yaitu terkait dengan upaya penyempurnaan pelaksanaan KAD yang telah berjalan untuk menjadi

proses KAD yang berkelanjutan, serta identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan KAD di tahun ini agar dapat menjadi penyempurnaan pelaksanaan KAD di tahun 2026.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

<b>3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi TW IV</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b> <small>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)</small>
<b>Triwulan I</b>			
	Identifikasi isu terkait optimalisasi peran BUMN Bidang Logistik untuk implementasi KAD	Terlaksana	High Level Meeting TPID dan Kunjungan Lapangan di Kalimantan Utara tanggal 6 Maret 2025 yang merekomendasikan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok melalui penguatan KAD.
<b>Triwulan II</b>			
	Penyusunan Alternatif Penyelesaian isu terkait optimalisasi peran BUMN bidang Logistik untuk implementasi KAD melalui Rapat Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk merumuskan Piloting Implementasi KAD dengan melibatkan BUMN Bidang Logistik	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinas dan monitoring dengan Bank Indonesia dan Kementerian/ Lembaga, serta BUMN bidang logistik terkait untuk merumuskan Piloting Implementasi KAD</li> <li>• Rapat Koordinasi tgl 23 April 2025 di Tual terkait Optimalisasi Peran PT PELNI dalam penyediaan angkutan penumpang dan barang</li> <li>• Rakor Tindaklanjut KAD tanggal 2 dan 30 Juni 2025 melauai video conference.</li> <li>• Rakor tindaklanjut KAD Tarakan tanggal 11 Juni</li> </ul>

			2025 melalui video conference.
<b>Triwulan III</b>			
	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait optimalisasi peran BUMN bidang Logistik untuk implementasi KAD melalui Rapat Koordinasi dengan Perusahaan BUMN Bidang Logistik untuk merumuskan Piloting Implementasi KAD dengan melibatkan BUMN Bidang Logistik	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah (KAD) Tarakan tanggal 7 Juli 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom.</li> <li>• Melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi KAD di Wilayah Tarakan tanggal 9 September 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom.</li> <li>• Melaksanakan Diskusi Rencana Pemanfaatan Platform KADEx untuk Implementasi KAD tanggal 30 September 2025 di Kemenko Perekonomian.</li> </ul>
	FGD penyusunan desain Piloting KAD dengan seluruh stakeholder.	Terlaksana dengan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan desain Piloting KAD dengan seluruh stakeholder dilaksanakan melalui rapat – rapat koordinasi dan implementasi telah terlaksana.</li> </ul>
	Pelaksanaan Piloting Implementasi KAD dengan melibatkan BUMN Logistik.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada realisasi transaksi KAD untuk pengiriman bawang merah dari Enrekang pada tanggal 18 Agustus 2025 dan 3 September 2025 sebanyak 1 ton per pengiriman. 4. Terdapat dua kapal penumpang Pelni dimanfaatkan pengiriman yang dapat untuk KAD di wilayah Tarakan yaitu KM. Bukit Siguntang dan KM. Lambelu.</li> </ul>
<b>Triwulan IV</b>			
1.	Monitoring dan evaluasi peran BUMN bidang Logistik untuk implementasi KAD termasuk hambatan dan rekomendasi kebijakan untuk tahun berikutnya.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Rapat Internal Tindak Lanjut KAD Tual - Persiapan GNPIP Sulampua pada tanggal 13 Oktober 2025 melalui zoom meeting. Menuju TPID Sulampua <i>Pilot Project</i> KAD Tual di <i>hold</i> sementara karena</li> </ul>

			<p>terdapat beberapa isu seperti minimnya angkutan transportasi BUMN Logistik di cakupan daerah Tual dan diputuskan untuk melakukan peninjauan KAD eksisting yang sudah berjalan untuk disinergikan dengan BUMN Logistik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada tanggal 13 Oktober 2025, melakukan <i>update</i> hasil analisa yang terdiri dari pendataan list potensial KAD oleh Bank Indonesia dan melakukan diskusi bersama Pelni untuk proses pengajuan biaya subsidi oleh Asdep Infralog.</li><li>• Melaksanakan Rapat lanjutan dalam rangka tindak lanjut KAD Sulampua pada tanggal 22 Oktober 2025 melalui zoom meeting. Dilakukan pembahasan isu yang terjadi di lapangan dan pendataan biaya-biaya yang mempengaruhi distribusi komoditas pangan</li><li>• Koordinasi antara Asdep Infralog Kementerian Koordinator Perekonomian, Bank Indonesia, dan Pelni pada tanggal 23 Oktober 2025 untuk mempersiapkan proses Sinergi BUMN Logistik pada kegiatan KAD. Proses yang diperlukan adalah pengajuan surat pengantar kepada pihak Pelni, membuat Berita Acara bersama 3 instansi terkait, dan membuat PKS.</li><li>• GNPIP Sulampua terlaksana pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan Pelni menyampaikan</li></ul>
--	--	--	--

			<p>kesanggupan untuk melakukan Sinergi BUMN Logistik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asdep Infraclog sudah mengirim surat pengantar kepada pihak Pelni pada tanggal 23 Oktober 2025 dan menyusun draft BA.</li> <li>• Draft BA sudah disusun oleh Asdep Infraclog pada tanggal 10 November 2025. Pada saat ini, sedang dalam proses pembahasan bersama pihak Bank Indonesia dan Pelni.</li> <li>• Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Kepmenko Gugus Tugas dan Sekretariat Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi pada tanggal 3 Desember 2025 secara Daring dengan hasil Pembentukan gugus tugas terdiri atas dua susunan keanggotaan, yaitu: (1) Gugus Tugas Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, dan (2) Sekretariat Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi, yang selanjutnya disebut Sekretariat.</li> </ul>
--	--	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah (KAD) Tarakan tanggal 7 Juli 2025 menghemat anggaran sebesar Rp.2.430.000, karena dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom; dan
- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi KAD di Wilayah Tarakan tanggal 9 September 2025 menghemat anggaran sebesar Rp.2.430.000, karena dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Hasil efisiensi tersebut diatas dapat dialokasikan untuk anggaran melaksanakan kegiatan Diskusi Rencana Pemanfaatan Platform KADEx untuk Implementasi KAD tanggal 30 September 2025 di Kemenko Perekonomian.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Diperlukannya penentuan kesepakatan satuan harga yang ditetapkan antara pelaku usaha khusus pilot project KAD Wilayah Tarakan dan bantuan subsidi biaya transportasi.
2. Pelaku usaha menganggap biaya transportasi masih terlalu tinggi dan berharap mendapatkan subsidi melalui program KAD ini. Pelaku usaha sudah pernah memanfaatkan subsidi dari Badan Pangan Nasional melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) namun prosesnya dirasa rumit untuk dilakukan.

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Bank Indonesia mendampingi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dokumen turunan MoU yang ditargetkan akan ditandatangani pada acara GNPIP Kalimantan tanggal 25 September 2025;
2. Bank Indonesia mendampingi Pemerintah Daerah untuk konsolidasi pelaku usaha sehingga kuantitas pengiriman dapat dioptimalkan dan biaya transportasi lebih efisien;
3. Koordinasi dengan PT Pelni untuk penjajakan opsi harga kontrak khusus dalam kerangka KAD setelah ada kepastian kuantitas dan frekuensi pengiriman.

### **Latar Belakang**

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan proses koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian kebijakan yang mendukung inovasi pembiayaan daerah, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur. proses tersebut dinilai efektif apabila kebijakan disusun melalui tata kelola yang baik (transparan, partisipatif, berbasis bukti), ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya, serta hasil pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi melalui laporan yang terstruktur.

### **3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah**

**1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Inovasi Pembiayaan Daerah**

*% efektivitas SKP*

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 80% pada Triwulan IV Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	%	80	80	100

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah yang mencapai target merupakan hasil koordinasi yang era tantara berbagai stakeholders dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun transfer pusat.

Naiknya minat dari Pemerintah Daerah untuk menginisiasi pembiayaan kreatif yang menjadi faktor pendorong realisasi di Triwulan IV dilandasi oleh beberapa alasan antara lain:

1. Keterbatasan fiskal dari Pemerintah Daerah dalam membiayai kebutuhan di Daerah, khususnya terkait dengan Pembangunan Infrastruktur yang dibutuhkan oleh Masyarakat di Daerah
2. Dorongan dari Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan pembiayaan kreatif untuk mendukung
3. Mulai meningkatnya kapasitas pengetahuan dari perangkat di Daerah

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

<b>3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b> <small>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)</small>
<b>Triwulan I</b>			
1	Identifikasi Perencanaan Obligasi / Sukuk Daerah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan IFC dan MCAI pada 20 Januari 2025 di Gedung Pos Ibukota dengan agenda konfirmasi komitmen MCAI dan IFC dalam mendukung proses penerbitan obligasi dan sukuk daerah</li> </ul>
2	Identifikasi daerah strategis dan proyek potensial dalam penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan dengan ADB pada 11 Februari 2025 di Gedung Pos Ibukota dengan agenda identifikasi daerah dengan DSCR yang memadai untuk penerbitan obligasi dan sukuk daerah, serta komitmen ADB</li> </ul>
<b>Triwulan II</b>			
3	Penyusunan Alternatif Penyelesaian isu Pendanaan atau	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi dengan donor (IFC, MCAI, ADB, dan</li> </ul>

	dukungan donor dalam persiapan penerbitan		World Bank) pada tanggal 14 April 2025 melalui zoom meeting
4	Penyusunan alternatif isu melalui persiapan rating dan project selection pemda dalam potensial dalam mendukung penyediaan infrastruktur	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi dengan Jabar terkait pada 15 April 2025 melalui zoom meeting</li> </ul>
5	Penyesuaian alternatif penyelesaian isu melalui pembagasan obligasi/sukuk daerah bersama DPRD	Tertunda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terlaksana karena masih fokus dalam pemilihan proyek</li> </ul>
<b>Triwulan III</b>			
6	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Identifikasi Obligasi Sukuk Daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penerbitan Sukuk Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 September 2025.</li> </ul>
7	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Buku Pembiayaan Infrastruktur	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku sudah didistribusikan kepada Pemerintah daerah melalui kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif di Bali tanggal 18 September 2025.</li> </ul>
8	Pelaksanaan capacity building Pemda potensial	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan DMU Training untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Juli 2025.</li> </ul>
9	Sosialisasi Skema Pembiayaan Alternatif mendukung penyediaan infrastruktur	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghadiri Sosialisasi Implementasi HPT Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2024 di Graha Sawala tanggal 7 Agustus 2025 di Kemenko Perekonomian.</li> </ul>
<b>Triwulan IV</b>			
10.	Monitoring dan evaluasi penerbitan Obligasi/ Sukuk Daerah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Penerbitan Sukuk</li> </ul>

			<p>Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 November 2025, dengan hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akan berkoordinasi dengan DPRD Sumbar terkait pengalokasian anggaran persiapan penerbitan Sukda pada RAPBD 2026 dan Pemerintah Provinsi Sumbar akan menentukan struktur DMU dan Proyek infrastruktur dasar apa yang akan dijadikan <i>underlying asset</i> selain RSUD. Word Bank akan melakukan pendampingan kepada Sumatera Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan Rapat Koordinasi SOP Link Pinjaman Daerah TW-III 2025 pada tanggal 2 Desember 2025 di Jakarta dengan hasil Akan diagendakan diskusi Forum SOP Link dengan Kementerian PU untuk membahas sinergi pinjaman daerah dengan program Inpres Jalan Daerah (IJD)</li></ul>
--	--	--	---

			serta dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas sinergi dengan program SIHREN.
3.	Finalisasi Buku Pembiayaan Alternatif Infrastruktur	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana dan telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di Daerah pada acara sosialisasi di Bali dan Padang</li> </ul>
4.	Penyelenggaraan <i>innovative financing for infrastructure summit</i>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Daerah, pada tanggal 6 November 2025 di Sumatera Barat, dengan hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melanjutkan penyiapan dokumen kelayakan dari proyek-proyek yang menjadi <i>underlying asset</i> dari penerbitan Sukda dan Memastikan pengembalian investasi untuk penerbitan Sukda yang melibatkan BLUD.</li> </ul>

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada pendistribusian buku sosialisasi dalam bentuk digital (pdf) sehingga dapat menghemat biaya cetak sebesar Rp.6.000.000. Hasil efisiensi tersebut diatas dapat dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif di Bali tanggal 18 September 2025.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Banyaknya Daerah serta perbedaan kapasitas fiskal dari Daerah-Daerah tersebut cukup menyulitkan untuk dapat melakukan peninjauan secara tepat kepada Daerah yang memang memiliki komitmen, kapasitas fiskal yang memenuhi, serta memiliki potensi pemanfaatan yang layak. Hal ini khususnya terkait dengan anggaran dan waktu yang dibutuhkan. Asdep Infralog telah mencoba mensiasatinya dengan membagi sosialisasi menjadi dua bagian, yakni untuk Pemda potensial di Indonesia Timur maupun Indonesia Barat.
2. Perubahan Kepala Daerah yang terjadi pada awal tahun 2025 ini juga memberi dampak negative khususnya terkait dengan komitmen dari Kepala Daerah. Selain itu, pemahaman yang berbeda antara eksekutif (Kepala Daerah) dan legislative (DPRD) juga memberikan dampak negative di beberapa kasus.
3. Pemahaman terkait pembiayaan inovatif yang masih belum dipahami secara baik di mayoritas Daerah di Indonesia
4. Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah yang dapat dialokasikan untuk penyiapan dokumen maupun hal teknis lainnya yang diperlukan untuk melakukan inovasi pembiayaan daerah

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pelaksanaan identifikasi untuk Pemerintah Daerah yang lebih spesifik yang memenuhi kriteria sehingga dapat lebih mencapai target sasaran yang lebih baik
2. Penyampaian *lesson learned* dan pedoman teknis spesifik yang dapat digunakan sebagai pendalaman pemahaman baik di tingkat pengambil Keputusan di Pemerintah Daerah maupun di Tingkat legislative (DPRD)
3. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga untuk dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan lebih tepat sasaran

## **4**

### **Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **4.1 Presentase Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang**

#### **Latar Belakang**

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni

**Pengembangan  
Badan Usaha Milik  
Negara Bidang  
Infrastruktur dan  
Logistik**

(1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{ Rerata Jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah item Survey}}$$

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 adalah Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik. Adapun target realisasi tingkat kepuasan tersebut adalah 3 dari 4 yang telah dicapai pada triwulan IV, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	indeks	3 dari 4	3.71	100

Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,71 dari target yang ditetapkan sebesar 3 sampai laporan ini disusun.

Realisasi Triwulan IV pelaksanaan Survey kepuasan didorong oleh beberapa faktor antara lain melalui tata Kelola relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, identifikasi isu dan solusi yang menjawab permasalahan, serta PIC yang tetap untuk tiap-tiap Stakeholder terkait.

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

**4.1 Presentase Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
----	--------------	--------	--

**Semester I**

1.	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi. sinkronisasi. dan pengendalian BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Semester I 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dikirimkan link survey kepada 20 responden yang berasal dari lintas K/L dan BUMN terkait</li> </ul>
<b>Semester II</b>			
2	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi. sinkronisasi. dan pengendalian BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Semester II 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dikirimkan link survey kepada 20 responden yang berasal dari lintas K/L dan BUMN terkait</li> </ul>
<p><b>Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b>  Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah yang cukup gemuk dengan tugas dan fungsi yang cukup beririsan serta banyak perubahan di tahun 2025 seringkali mempersulit koordinasi yang dilakukan</li> <li>2. Waktu yang cukup ketat untuk mendapatkan hasil di tiap semester dengan tenggat waktu pengumpulan Lapkin</li> </ol> <p>Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan terkait yang memiliki hubungan dengan Keasdepan Infralog serta menjaga relasi yang baik dan saling membantu dengan para pemangku kepentingan lainnya</li> </ol>			

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.1 Indeks Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik**

**Latar Belakang**

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 adalah Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik sebesar 85%. Adapun target realisasi tingkat kepuasan tersebut adalah 85% yang telah dicapai pada Triwulan IV, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	%	85	85	100

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

**5.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan)
----	--------------	--------	---

			pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
<b>Triwulan I</b>			
1	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Rencana Aksi, Manual IKU serta penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Januari 2025
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah disusun pada kuartal ke 2.
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Seluruh administrasi persuratan telah dilakukan melalui SRIKANDI
<b>Triwulan II</b>			
4	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Telah disusun pada kuartal ke-3.
5	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Seluruh administrasi persuratan telah dilakukan SRIKANDI
6	Penyusunan manajemen Risiko	Terlaksana	Manajemen Risiko telah tersusun.
<b>Triwulan III</b>			
7	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III	Terlaksana	Telah disusun pada kuartal ke-4.
8	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Seluruh administrasi persuratan telah dilakukan melalui SRIKANDI
9	Penyusunan manajemen Risiko	Terlaksana	Manajemen Risiko telah tersusun.
<b>Triwulan IV</b>			
10.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Januari 2026
11.	Penyusunan draft Perjanjian Kerja tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Januari 2026
12.	Optimalisasi pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Seluruh administrasi persuratan telah dilakukan melalui SRIKANDI
<p>Terdapat penghematan ATK sebesar Rp.2.000.000 dikarenakan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III, optimalisasi pemanfaatan Srikandi, dan penyusunan manajemen resiko dilakukan secara digital (pdf) dan dialihkan untuk anggaran melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan lain.</p> <p>Hasil efisiensi tersebut diatas dapat dialokasikan untuk anggaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya.</p>			

**Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyusunan PK, Renaksi, Manual IKU, serta Lapkin tanpa ada hubungan dengan PK pegawai yang mengerjakan kurang memberikan motivasi untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang berkualitas dan dijaga kualitasnya secara baik. Selain itu, tenggat waktu untuk masing-masing dokumen tidak ditetapkan jauh-jauh hari dan seringkali ditetapkan cukup ketat.
2. Aplikasi Srikandi masih memiliki konsistensi yang kurang terjaga sehingga seringkali mempersulit proses persuratan di saat- saat tertentu
3. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dan dijaga berada pada link yang berbeda-beda sehingga cukup menyulitkan untuk mengakses ketika dibutuhkan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perencanaan dan perkiraan *deadline* sehingga pengerjaan dapat dilakukan sebelum *deadline* dan selesai tepat waktu
2. Adaptasi yang lebih baik dengan perubahan yang seringkali terjadi di lingkungan internal Kemenko Perekonomian

Jakarta, 2 Januari 2026

**Asisten Deputi Pengembangan BUMN  
Bidang Infrastruktur dan Logistik**



**Yuli Sri Wilanti**